

SUMMARY DISTRICT CITIZEN ENGAGEMENT PLAN

PROPINSI NUSA TENGGARAN TIMUR – PULAU SUMBA

Kabupaten Sumba Barat

Visi Sumba Barat Impian

Grand Vision Sumba Barat Impian:

Sumba Barat: *“Tana Pari Piaku, Loku Waikalala”*: tanah yang menghasilkan, air yang menghidupkan sampai kebahagiaan dan kesejahteraan. *“Tana Da Dikki Watu Da Ngero. Kanyako Ndana Wee Maringa Loko”*: membangun mimpi bersama dalam kebersamaan yang memberikan kedamaian dan keharmonisan bagi semua pihak dengan bangunan komitmen dan semangat yang tak pernah padam untuk membangun Sumba menuju perubahan. Sumba Barat *Uniquely*, dari *Mandara* menuju *Mandiri*.

Warga negara beserta organisasinya: adalah pemilik dan salah satu pilar utama yang dapat menegakkan demokrasi yang kuat dan berkesinambungan. Segenap insan Sumba Barat, terutama orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal, secara kolektif, mampu memperjuangkan kepentingan dan hak-hak dasarnya sebagai warga serta mempertahankan identitasnya dengan cara membangun relasi dan interaksi sosial di lingkungan komunitasnya dan mengorganisir diri dengan bergabung dengan organisasi di komunitasnya, membentuk organisasi baru atau bergabung/berafiliasi pada Organisasi Masyarakat Sipil yang lebih besar.

Melalui interaksi yang terus menerus dan terorganisir diri dalam komunitasnya dan melembaga, maka warga, terutama orang miskin, perempuan, pemuda, dan kaum marginal lainnya dapat membangun kesadaran kolektif dan solidaritas sosial, memperoleh pengetahuan dan dapat memahami hak-hak dasarnya sebagai warga negara dan memperjuangkan hak-haknya tersebut. Selain itu, warga mengetahui kewajibannya dan dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Semua warga Sumba Barat, baik perempuan maupun laki-laki, lintas umur (dari anak, pemuda hingga orang tua), terutama orang miskin, perempuan, pemuda, kaum marginal lainnya menjadi lebih berilmu, cerdas, kreatif, terampil, inovatif, dan berprestasi. Semua anak di bawah usia Lima (5) tahun memiliki akses ke Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Semua anak usia sekolah dasar (SD dan SMP) dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar formal dan mendapat pendidikan secara gratis, bebas pungutan, dan berkualitas. Anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan dasar mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Orang dewasa yang masih buta aksara dan anak-anak muda putus sekolah memiliki akses ke program pendidikan luar sekolah melalui program Paket (Paket A, Paket B dan Paket C), pendidikan kesetaraan dan pendidikan kecakapan hidup (kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan/keterampilan vokasional dan kecakapan akademik).

Warga Sumba Barat, adalah warga yang selalu belajar dan membaca. Belajar dan membaca menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat. Warga Sumba Barat mampu membagi ilmu dan mengaplikasikan teknologi, seperti teknologi pertanian yang ramah lingkungan, misalnya: sistem tumpang sari, pertanian organik, pengairan yang teratur, diversifikasi tanaman. Mampu memanfaatkan dan mengembangkan asset-asset lokal (seperti kotoran ternak, air terjun, sinar matahari) yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan energi alternatif seperti biogas, biofuel, biodiesel, energi tenaga surya, energi listrik tenaga air, tenaga angin serta pembuatan pupuk dan pestisida organik. Warga Sumba Barat adalah warga yang semakin disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi,

optimisme dan berpikir progresif untuk perubahan. Sumba Barat menjadi gudang Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan handal di NTT serta kawasan timur Indonesia serta mampu bersaing atau berkompetisi di era pasar bebas dan globalisasi.

Warga Sumba Barat, terutama orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya terlibat aktif dalam setiap ruang, proses dan tahapan pembangunan dan juga dalam pengambilan keputusan, baik yang berhubungan dengan Negara maupun yang berhubungan dengan urusan sosial kemasyarakatan (keluarga, adat isitiadat, agama, organisasi sosial, dan lain-lain). Warga memiliki posisi tawar dan mampu berpikir kritis untuk menilai semua kebijakan pemerintahan yang berdampak pada kehidupannya.

Warga mampu mendayagunakan semua potensi/asset di komunitasnya dan lingkungan sekitarnya secara bertanggung jawab, kreatif, inovatif dan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Pendayagunaan semua asset diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup warga, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan serta pendidikan, kesehatan, dan pendapatan ekonomi warga dan/atau keluarganya. Semakin banyak warga berinisiatif atas kekuatan sendiri untuk mendirikan koperasi barter beroperasi di semua desa terpencil di Sumba Barat. Koperasi barter dikelola oleh pengurus kelompok dengan mengutamakan prinsip-prinsip manajemen yang praktis dan terbuka, adanya sistem pencatatan administrasi dan keuangan usaha, adanya rapat badan pengurus dan anggota yang dilaksanakan secara rutin dan kontinu, adanya sistem pembagian hasil usaha secara adil, adanya mekanisme pembuatan keputusan yang partisipatif. Semakin banyak warga Sumba Barat yang menciptakan pekerjaan untuk sendiri melalui usaha bisnis dengan mendirikan unit-unit usaha mikro dan kecil (industri rumah tangga). Warga mengetahui dan memahami isu-isu pemanasan global dan ancaman terhadap keberlanjutan makhluk dan lingkungan hidup di planet bumi ini. Oleh karena itu, semakin banyak warga yang mengembangkan hutan keluarga sebagai penunjang kesejukan, konservasi tanah dan air, dan juga untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Menjadikan Sumba Barat “ibarat karpet hijau”, hijau sepanjang masa.

Warga adalah pemilik atau “tuan” atas sumber-sumber daya alam. Pemilik atas tanah beserta kekayaan alam yang ada di dalam dan di atas tanah, seperti barang-barang tambang, hutan dan margasatwa, air tawar dan air laut beserta isinya serta ruang angkasa. Siapapun atau organisasi/institusi manapun dari luar, yang berencana mendayagunakan-mengeksploitasi sumber-sumber daya alam milik komunitas harus terlebih dahulu mendapat izin pengelolaan secara tertulis dari komunitasnya, dan berkomitmen untuk tidak merusak lingkungan dan asset-asset warga. Warga mendapat kompensasi yang adil atas pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak luar. Warga berdaulat, berdaya dan menjadi mandiri untuk mengelola sumber-sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan anggota komunitasnya.

Warga semakin menyadari, mengetahui, memelihara dan melestarikan asset-asset dan khasanah sosial-budaya Sumba Barat agar identitas dan budaya megalithnya tidak digerus oleh ancaman budaya globalisasi dan kapitalisme. Di planet bumi ini, hanya di Sumba Barat, satu-satunya situs peradaban, yang masih memiliki Budaya Megalith-*Marapu* yang hidup sejak 4,500 tahun yang lalu, dan masih bertahan hidup hingga abad modern ini. Sumba Barat memiliki potensi pariwisata yang eksotik seperti pantai yang indah dengan hamparan pasir putih ombak yang menantang, nyiur melambai, atraksi *Pasola* yang heroik mencerminkan semangat perjuangan masyarakat Sumba Barat. Kampung adat yang artistik, *Wulla Podu* yang sarat akan makna religius dan mistis. Ritual *Poghu Watu* (potong batu) dan *Tingi Watu* (tarik batu) menuju *Parai Marapu* (dunia para arwah) merupakan ritual yang spektakuler, memukau dan menonjolkan mistisisme spiritualitas, komitmen dan kebersamaan. Kain Sumba dengan berbagai motif, warna dan desain, merupakan artefak budaya yang fantastik dan sarat makna. Warga semakin sadar untuk tetap mempertahankan kapital

sosial seperti gotong royong/kerja sama dan musyawarah untuk mufakat. Warga semakin sadar untuk berperilaku hidup hemat alias tidak boros dan konsumtif pada saat ritual adat. Warga, terutama orang miskin, perempuan, pemuda, kaum marginal dan kaum tak berdaya lainnya mengetahui, menyadari dan mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat, mengontrol kesehatan secara teratur, mengkonsumsi makanan yang bergizi agar anak-anaknya terbebas dari ancaman gizi buruk dan busung lapar. Ibu-ibu hamil dan yang melahirkan mendapat perawatan kesehatan secara cepat, terjangkau, murah dan berkualitas. Semakin banyak rumah tangga yang mampu untuk mengembangkan dan memanfaatkan apotik hidup. Warga memiliki akses untuk mengetahui informasi kesehatan berkaitan dengan gizi dan penyakit. Warga menyadari dan bertanggung jawab untuk menjaga fasilitas-fasilitas publik seperti fasilitas air bersih, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas penerangan dan fasilitas-fasilitas publik lainnya.

Warga Sumba Barat, menjadi semakin proaktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekitarnya serta melapor kepada pihak yang berwajib semua pelanggaran hukum atau tindakan kriminal yang terjadi. Warga menjadi lebih sadar dan taat akan hukum serta mencintai perdamaian dan kasih. Warga beserta organisasinya mampu menyelesaikan konflik-konflik di lingkungannya dengan cara-cara damai dan mengedepankan pendekatan berbasis budaya dan adat istiadat. Warga beserta organisasinya mempraktekkan budaya toleransi, menghargai keberanekaragaman perbedaan, baik yang berbasis suku, agama, ras, golongan, gender maupun kepentingan-kepentingan politik. Warga mempraktekkan dan mempromosikan nilai dan prinsip partisipasi, akuntabilitas serta menjunjung tinggi moralitas, etika dan spiritualitas dalam kehidupannya.

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) beserta Anggota-Anggotanya: adalah salah satu aktor utama dari tata pemerintahan yang baik dan demokratis, selain pemerintahan (negara) dan dunia usaha swasta. OMS merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong dan menegakkan demokrasi yang kuat dan demokratisasi. OMS dan anggota-anggotanya mampu secara konsisten mempraktekkan dan mempromosikan komitmen untuk berperilaku dan bertindak demokratis serta membangun relasi dan interaksi yang dinamis, egaliter dan setara dalam organisasinya dan dengan kelompok kepentingannya (konstituen utamanya), serta secara konsisten memperjuangkan kepentingan-kepentingan anggotanya, organisasi serta konstituennya.

OMS secara terus menerus membangun kapasitas organisasi dan anggotanya untuk keberlanjutan organisasinya dan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai untuk perubahan yang berdampak pada orang miskin, perempuan, kaum marjinal dan orang yang kurang berdaya lainnya. OMS bekerja langsung di akar rumput, menjadikannya lebih berakar pada masyarakat yang mereka layani. Inilah yang membangun fondasi bagi legitimasi sosial terhadap eksistensi OMS dalam kiprahnya. OMS memberikan bantuan teknis kepada berbagai organisasi warga/rakyat beserta anggota-anggotanya yang mereka layani, agar warga dan organisasinya menjadi lebih berpengetahuan, terampil, dan efektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingan, nilai-nilai dan identitasnya. OMS dan anggota-anggotanya tidak melakukan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Mampu mengelola kelembagaan dengan menegakkan nilai dan prinsip manajemen yang terbuka. Adanya pergantian pimpinan secara berkala yang dipilih secara demokratis. Adanya sistem dan mekanisme yang mengatur soal transparansi dan akuntabilitas penggunaan asset-asset lembaga, penggunaan dana dan sebagainya. Adanya mekanisme pengambilan keputusan secara partisipatif. Adanya rapat rutin antara badan pengurus dan anggota.

OMS dan anggotanya berperspektif lingkungan misalnya tidak menggunakan energi listrik yang berlebihan, menyediakan tempat sampah untuk sampah organik dan non organik. OMS dan

anggotanya menjunjung tinggi kesetaraan gender dan inklusi sosial misalnya dengan memperhatikan keseimbangan jumlah staff antara laki-laki dan perempuan, lintas suku, dan sebagainya. OMS memberikan sanksi bagi anggota-anggotanya yang terbukti melanggar aturan dan tata tertib organisasi. Mampu mendemonstrasikan dan mempromosikan pengelolaan konflik dengan cara-cara damai dan menghargai perbedaan baik yang berbasis suku, agama, ras, golongan, gender dan kepentingan-kepentingan politik. OMS dan anggota-anggotanya kreatif dan inovatif untuk mencari sumber-sumber pendanaan lembaga dengan mengembangkan kegiatan *fundraising* demi kemandirian lembaga dan keberlanjutan program.

OMS memiliki kelompok kepentingan yang jelas dan berakar di masyarakat dan secara konsisten untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan dari masyarakat, terutama orang miskin, perempuan, pemuda, kaum marginal dan kurang berdaya lainnya. OMS dan anggota-anggotanya mampu memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (RPJM Desa) dari tingkat dusun/lingkungan hingga kabupaten. Kemudian bersama dengan perwakilan masyarakat (desa dan kecamatan) mengkawal dan memperjuangkan kepentingan masyarakat (perencanaan dari desa dan kecamatan) kepada Pemerintah Kabupaten. OMS bersama dengan warga dan organisasi warga mendorong agar RPJM Kabupaten Sumba Barat disusun mengacu pada semua RPJM Desa.

OMS dan anggota-anggotanya mampu melakukan interaksi yang dinamis dengan agenda-agenda pemerintahan seperti berpartisipasi dan mengawasi setiap tahapan dan proses pembuatan kebijakan, menilai kebijakan-kebijakan publik, memobilisasi asset-asset yang ada secara efektif untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan warga atau masyarakat.

OMS dan anggota-anggotanya mampu melestarikan dan mempromosikan asset sosial dan budaya Sumba Barat seperti budaya dan situs-situs Megalith dan *Marapu, Pasola, Wulla Podu*, kampung adat, pantai-pantai, hutan, burung, sungai, air terjun, kain Sumba dan tradisi-tradisi lainnya. OMS mampu memfasilitasi dan mempromosi teknologi tepat guna untuk pengembangan energi alternatif, pengembangan pertanian organik dan sebagainya. OMS mampu memfasilitasi pengelolaan koperasi barter (pengembangan kapasitas pengurus dan kelebagaannya), mendorong muncul dan berfungsinya kelompok atau organisasi berbasis komunitas/masyarakat, seperti kelompok pengelola air, organisasi petani, organisasi simpan pinjam, dan sebagainya.

Jaringan antara OMS: merupakan kekuatan kolektif dari kekuatan OMS yang lebih besar dan luas, bersifat lintas jender, lintas sektor dan isu serta lintas aktor untuk mengkawal dan menegakkan demokrasi yang kuat dan demokratisasi. Jaringan antar OMS mempromosikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai partisipannya untuk mendorong perubahan yang berdampak luas pada orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya.

Jaringan antara OMS mampu menggagas, memfasilitasi lahir dan berfungsinya “Balairung Sosial” sebagai wadah dan ruang pembelajaran sosial untuk berbagi gagasan dan pengalaman, proses belajar dan belajar proses, membagi dan mendapatkan informasi, bertemu dan membangun solidaritas sosial, *trust* serta kesadaran dan kekuatan kolektif untuk perubahan. Balairung Sosial bisa diakses oleh siapa saja, terutama orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya. Jaringan antara OMS mampu untuk mendemonstrasikan dan mempromosikan interaksi atau pertautan yang dinamis dengan semua pihak, terutama Pemerintahan dan dunia usaha swasta. Jaringan antara OMS mampu memfasilitasi pembentukan jaringan pemasaran komunitas dengan dunia usaha dan menyediakan bantuan teknis dan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk bisa beroperasinya jaringan tersebut. Jaringan antara OMS mampu menciptakan media-media kreatif

dan inovatif untuk kampanye publik berkaitan dengan isu-isu untuk kemasyarakatan dan pemerintahan untuk perubahan sosial. Jaringan antara OMS mampu membuka dan mempromosikan jaringan kemitraan yang lebih luas baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional.

Jaringan antar OMS mampu memainkan peran dan fungsi yang lebih strategis terutama dalam memperjuangkan lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berpihak pada orang miskin, perempuan, pemuda, orang marjinal dan orang yang kurang berdaya lainnya serta kelompok masyarakat yang lebih luas. Jaringan antara OMS mampu membuka akses dan melakukan interaksi yang dinamis dengan agenda-agenda pemerintahan seperti berpartisipasi dan mengawasi setiap tahapan dan proses pembuatan kebijakan, mengkaji dan menilai kebijakan-kebijakan publik yang berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat, mengajukan konsep atau naskah akademik kepada pembuat dan pengambil kebijakan untuk mempengaruhi isi atau muatan kebijakan/hukum (*content of law*), struktur kebijakan/hukum (*structure of law*) dan budaya kebijakan/hukum (*culture of law*) agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum kurang berdaya lainnya.

Jaringan antara OMS mampu mencari dan memproduksi pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk memberikan layanan yang bermutu tinggi dalam pengembangan kapasitas bagi OMS partisipan, warga dan bahkan pemerintahan dan dunia usaha swasta. Jaringan antara OMS mengembangkan kajian-kajian atau riset-riset aksi sebagai masukan untuk formulasi kebijakan dan/atau desain program.

Jaringan antara OMS mampu mendemonstrasikan dan memperjuangkan budaya toleransi, terbuka pada perubahan, dan menghargai keberanekaragaman ideologi, perbedaan, baik yang berbasis suku, agama, ras, golongan, gender maupun kepentingan-kepentingan politik. Jaringan antara OMS senantiasa apresiatif, menegakkan dan mempromosikan nilai dan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan sosial dan berperspektif lingkungan.

Pemerintahan (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) pada berbagai level merupakan salah satu pilar utama untuk menegakkan demokrasi dan demokratisasi. Pemerintahan juga merupakan salah satu aktor utama yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam upaya mendorong tata pemerintahan lokal yang baik dan demokratis. Pemerintahan beserta aparatnya mampu secara konsisten mempraktekkan dan mempromosikan komitmen untuk berperilaku dan bertindak demokratis serta membangun relasi dan interaksi yang dinamis, egaliter dan setara dalam organisasinya dan dengan warga dan organisasi warga, OMS, jaringan antara OMS, dan dengan berbagai pihak, serta secara konsisten memproduksi kebijakan-kebijakan dan program-program yang memberikan prioritas utama dan berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat banyak, terutama orang miskin, perempuan, pemuda, kelompok marginal lainnya.

Aparat pemerintahan semakin demokratis, arif dan bijaksana, memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin, memiliki pengabdian dan pengorbanan yang tulus, profesional, bertanggung jawab sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pemerintahan pada berbagai tingkatan semakin merakyat, apresiatif dan berkomitmen untuk lebih responsif, sensitif, akomodatif dan akuntabel pada asosiasi warga dan OMS yang terorganisir dan terlembaga untuk melaksanakan dan memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial, budaya serta sipil dan politiknya. Pemerintahan mampu menjamin dan memastikan kualitas, akuntabilitas dan transparansi dari setiap pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah menjamin dan membuka ruang bagi pengawasan yang lebih luas oleh warga dan organisasi warga, OMS dan jaringan terhadap pelayanan publik. Pemerintahan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk bidang pendidikan, kesehatan, penerangan, air bersih dan sanitasi, dan lain-lain. Pemerintah menciptakan dan beroperasinya sistem dan mekanisme yang dapat menyerap aspirasi dan menampung pengaduan masyarakat atas kinerja (*performance*)

pelayanan publik. Pemerintah memastikan transparansi dan akuntabilitas dipraktekan oleh para aparat pemerintahan di setiap kantornya dan agen-agen pelayanan publik mitra pemerintahan, misalnya setiap tender proyek dan pemenangnya diumumkan secara transparan. Pemerintah menjamin ada dan beroperasinya akses warga, OMS dan jaringan OMS terhadap informasi-informasi/dokumen-dokumen kebijakan pembangunan seperti APBD dan RPJM dan lain sebagainya.

Pemerintahan pada berbagai tingkatan mampu mempraktekkan, mempromosikan dan memastikan partisipasi yang luas dari warga negara, terutama keterwakilan orang miskin, perempuan, kaum marginal dan kelompok terpinggirkan atau tak berdaya lainnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, mulai dari tingkat dusun hingga kabupaten, serta menjamin konsistensi usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat dari desa dan kecamatan masuk dalam RPJM Kabupaten. Pemerintah memastikan ruang bagi perwakilan/delegasi dari pemerintah desa dan kecamatan, OMS dan jaringan antara OMS untuk mengkawal dan mempresentasikan hasil perencanaan yang telah disusun kepada forum SKPD dan pada Musrenbangkab. Pemerintah mampu memfasilitasi dan menyediakan anggaran bagi pemerintah desa untuk menyusun RPJM Desa. Semua desa memiliki dokumen RPJM Desa. Pemerintah menjamin dan membuat Perda agar setiap pembangunan di desa dan penyusunan RPJM Kabupaten Sumba Barat harus merujuk pada dokumen RPJM Desa. Pemerintah mampu memfasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah desa menuju otonomi desa. Pemerintahan membuat Peraturan Daerah tentang Perencanaan Partisipatif.

Pemerintah mampu menyediakan data dan informasi tentang desa dengan memfasilitasi pengisian profil-profil desa mengenai asset-asset/potensi desa, data orang miskin, dan membuat peta sosial desa. Pemerintahan menjamin perlindungan terhadap asset-asset lokal baik asset ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial dan budaya, maupun asset teknologi. Pemerintahan mempromosikan dan membuat regulasi untuk melindungi dan melestarikan asset-asset sosial dan budaya seperti pasola, podu, kampung adat, situs-situs megalith, pantai-pantai, hutan, burung, sungai, air terjun, kain sumba dan asset-asset budaya lainnya. Menyediakan fasilitas pendukung untuk mempertahankan dan mempromosikan asset-asset sosial budaya melalui Ekspo Budaya: visit Sumba Barat Year dan Komoditi Lokal, yang dilakukan setiap tahun. Pemerintah menjamin kemudahan akses terhadap modal, pengembangan kapasitas, informasi dan teknologi dan pemasaran hasil-hasil bumi masyarakat. Mampu menyediakan perlengkapan dan fasilitas untuk pengembangan teknologi energi alternatif, membuat kebijakan tata ruang yang berperspektif lingkungan.

Pemerintahan memprioritaskan program dan anggaran pembangunan untuk orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya. Pemerintah mampu menyediakan akses, infrastruktur dasar, fasilitas-fasilitas dan SDM yang memadai untuk kesehatan, pendidikan, perekonomian, sosial-budaya, keamanan dan lingkungan, dan sebagainya. Pemerintah menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara atas akses informasi; hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, pakaian dan perumahan; hak untuk mendapat jaminan sosial termasuk asuransi sosial; hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar yang gratis; hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi; hak untuk berkumpul dan berserikat; hak untuk turut serta dalam pemerintahan dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pemerintah mampu mendemonstrasikan dan mempromosikan nilai-nilai dan prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, keadilan sosial, kesetaraan jender dan inklusivitas sosial, anti korupsi, kolusi dan nepotisme, menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi persatuan dan toleransi, dan memberikan apresiasi dan pengakuan atas upaya-upaya dan hasil-hasil yang dilakukan oleh masyarakat.

Agenda Bersama Kabupaten

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berbasis Masyarakat dan Berkelanjutan
2. Akses dan Pelayanan Kesehatan yang Cepat, Murah, Mudah, Terjangkau, Berkualitas dan Berbasis Masyarakat.
3. Akses dan Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas
4. Pembangunan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal (Koperasi Barter, Kelompok Simpan Pinjam untuk kaum perempuan, Usaha Ekonomi Rumah Tangga – Home Industry)
5. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Masyarakat
6. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan (Termasuk Penganggaran) yang Partisipatif dan Berpihak pada Orang Miskin, Perempuan dan Kaum Marginal lainnya.
7. Pelayanan Publik yang Berkualitas
8. Kedaulatan Pangan Masyarakat
9. Pengembangan dan Penguatan Ruang Pembelajaran Sosial Para Pihak.

Summary Concept Paper

Kabupaten	: Sumba Barat
Nama Lembaga	: Yayasan Pakta Sumba
Judul Concept Paper	: Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat miskin dan perempuan yang berkelanjutan
Durasi program	: 30 bulan

Konsep paper dari Yayasan PAKTA Sumba Barat menggagas tindakan-tindakan yang dapat menyumbang ke arah perubahan pandangan/pola pikir dan perilaku warga untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan benar. Secara khusus konsep paper ini ingin mewujudkan akses warga miskin dan perempuan di 10 desa di kawasan hutan Ponorumbu, Sumba Barat terhadap air, kayu bakar dan bahan bangunan dengan cara mudah dan tidak merusak lingkungan. Warga sadar dan menggunakan haknya untuk mengelola sumber daya lokal melalui hutan keluarga dan perlindungan satwa lokal yang ada sehingga kehidupan ekonominya lebih baik. Kegiatan tersebut dijamin oleh peraturan desa disusun secara partisipatif. Warga mempraktekkan nilai-nilai keadilan jender dalam keluarga dan dalam kegiatan sosialnya. Warga menikmati tutupan vegetasi hutan yang semakin meluas. Program akan bekerja dengan organisasi warga di tingkat desa, dan pemerintahan desa untuk mewujudkan tujuan tersebut. Rencana aksi menggunakan pendekatan peningkatan kapasitas, pendekatan pengorganisasian, dan advokasi kebijakan.

Konsep paper menyumbang pencapaian TKLD dalam aspek keadilan sosial dan partisipasi. Konsep paper ini relevan dengan ACCESS tahap II karena ingin mendorong terjadinya interaksi dinamis antara masyarakat sipil dan pemerintah, melakukan pemberdayaan warga dan organisasi warga,

dan *Scaling up* dampak dan replikasi dari praktek-praktek yang baik. Rencana aksi ini akan dapat dicapai dalam waktu 30 bulan.

Kabupaten : Sumba Barat
Nama Lembaga : Yayasan Bahtera
Judul *Concept Paper* : Menyediakan Ruang bagi Orang Miskin, Perempuan dan Kaum Marginal lainnya
Durasi program : 2009 - 2010 (2 tahun)

Melalui *Concept paper* ini, Yayasan Bahtera ingin melihat perubahan di tingkat warga dan organisasinya, dalam memberi pengaruh terhadap pemerintah melalui proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatif di Kabupaten Sumba Barat. Perubahan tersebut akan dicapai melalui pendekatan penguatan kapasitas, pengawalan perencanaan dan penganggaran dan pengembangan media dan seni. Untuk itu, rencana aksi ini akan bekerja dengan fasilitator desa, fasilitator pendamping dan pemerintahan desa dalam mewujudkan perubahan yang mereka inginkan.

Rencana aksi ini ingin menghasilkan warga, khususnya perempuan, orang miskin dan kaum marjinal aktif menyampaikan aspirasinya, mengembangkan efektifitas organisasinya, terlibat dalam proses pembangunan desa (pemetaan asset, perencanaan-penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi), mengorganisir aksi-aksi untuk mengawal dan memastikan terakomodasinya RPJM desa dan kabupaten, serta memiliki posisi tawar dalam berinteraksi dan bernegosiasi dengan pihak luar (pemerintah maupun donor). Di kemudian hari, desa sasaran program akan menjadi model dan direplikasikan di wilayah lain. Dampak dari rencana aksi ini diperkirakan terjadi pada percepatan kesejahteraan warga khususnya kaum perempuan, kaum miskin dan kaum marjinal lainnya.

Secara khusus konsep paper menyumbang pada aspek partisipasi dalam tata pemerintahan lokal yang demokratis. *Concept paper* memiliki relevansi dengan strategy ACCESS Tahap II karena mendorong pemberdayaan warga, mendorong terjadinya interaksi dinamis antara warga dengan pemerintah dan mendorong upaya perluasan di seluruh desa di kabupaten Sumba Barat .

Kabupaten : Sumba Timur
Nama Lembaga :Yayasan Satu Visi
Judul *Concept Paper* :Pemberdayaan dan Penguatan Potensi Lokal untuk Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Di Kabupaten Sumba Barat - NTT
Durasi program : -

Melalui *Concept Paper*nya, Yayasan Satu Visi ingin melihat warga (petani) khususnya orang miskin dan perempuan berorganisasi, meningkatkan kapasitasnya untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui pertanian organic, pola pertanian yang menetap, dan bisa berkompetisi secara sehat. Organisasi tersebut mengembangkan strategi PSDA yang berkelanjutan, melakukan aksi dalam pengelolaan SDA, aktif membangun posisi tawar dengan pemerintah, mampu mengelola program secara efektif, dan mampu melayani kebutuhan anggotanya. Melalui federasi/asosiasi petani membangun posisi tawar terhadap harga komoditi pertanian dan secara pro aktif mengawasi dan mendialogkan hasil implementasi kebijakan pemerintah. Rencana aksi ini akan mereplikasi program Yayasan Satu Visi dalam mengembangkan kelompok tani di 7 desa (2 di kecamatan Lamboya, 2 di kecamatan Tanarighu dan 4 desa di kecamatan Wanokaka). Pendekatan yang akan

dipergunakan dalam rencana aksi adalah penguatan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi warga, pendampingan, pendidikan penyadaran, advokasi kebijakan serta publikasi dan diseminasi informasi. Yayasan Satu Visi akan bekerja langsung dengan kelompok masyarakat, pemerintah desa dan jaringan petani. Dengan mengembangkan strategi diatas, Yayasan Satu Visi ingin melihat dampak rencana aksi ini pada meningkatnya pendapatan, meningkatnya asset dan ketahanan pangan keluarga miskin yang menjadi anggota organisasi petani. Konsep paper ini menunjukkan sumbangannya pada seluruh aspek dalam tata pemerintahan lokal yang demokratis. Konsep paper sangat relevan dengan ACCESS Tahap II karena mengembangkan proses pemberdayaan, proses aksi interaksi antar organisasi petani dan dengan stakeholder lain serta memiliki cakupan pengaruh di tujuh desa di tiga kecamatan.